SKRIPSI

PERAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA DI KABUPATEN KUBU RAYA

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Oleh:

Muhammad Farash Sadewa

E1031211057

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

PONTIANAK

2025

SKRIPSI

PERAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) DALAM PENANGGULANGAN BENCANA DI KABUPATEN KUBU RAYA

Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Oleh:

Muhammad Farash Sadewa
NIM. E1031211057

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

PONTIANAK

2025

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) DALAM PENANGGULANGAN BENCANA DI KABUPATEN KUBU RAYA

Tanggung Jawab Yuridis Pada :

Muhammad Farash Sadewa

NIM. E1031211057

Disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing Utama

Dr. Arifin, S. Sos, M.A.B
NIP. 197105021997021002

Tanggal : 15 Maret 2026

Dosen Pembimbing Pendamping

Rulida Yuniarsih, S.IP, M.Si
NIP. 198306272006042020

Tanggal : 1 April 2026

HALAMAN PENGESAHAN

PERAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) DALAM PENANGGULANGAN BENCANA DI KABUPATEN KUBU RAYA

Oleh:

Muhammad Farash Sadewa

NIM. E1031211057

Dipertahankan di : Pontianak

Pada Hari/Tanggal : 7 April 2026

Waktu : 09.00 s/d selesai

Tempat : Ruang Sidang FISIP UNTAN

Tim Penguji

Ketua	Sekretaris
Dr. Arifin, S. Sos, M.A.B	Rulida Yuniarsih, S.IP, M.Si
NIP. 197105021997021002	NIP. 198306272006042020
Penguji Utama	Penguji Pendamping
Dr. Pardi,S.Sos, M.B.A	Bima Sujendra, S.IP, M.Si
NIP. 197209052002121003	NIP. 198805072014041002

Disahkan Oleh :
Dekan FISIP Untan

Dr. Herlan, Sos, M.Si
NIP. 197205212006041001

ABSTRAK

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) merupakan bencana yang hampir selalu terjadi setiap tahun di Kabupaten Kubu Raya, khususnya pada wilayah dengan dominasi lahan gambut. Kondisi geografis, panjangnya musim kemarau, serta kebiasaan membuka lahan dengan cara membakar menjadi faktor pemicu utama meningkatnya kejadian karhutla. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kubu Raya dalam menangani karhutla, dengan mengacu pada teori peran pemerintah menurut Ryaas Rasyid yang mencakup peran regulator, fasilitator, motivator, dan dinamisator.Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui observasi, wawancara mendalam, serta analisis dokumen. Informan penelitian meliputi pejabat BPBD yang berwenang dalam aspek pencegahan, kesiapsiagaan, rehabilitasi, dan rekonstruksi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPBD berperan sebagai regulator melalui penyusunan aturan serta pedoman teknis penanggulangan bencana. Sebagai fasilitator, BPBD menyediakan sosialisasi, pelatihan, dan fasilitas pemadaman, meskipun masih mengalami hambatan berupa keterbatasan personel dan sarana. Peran motivator tercermin dari upaya BPBD mendorong keterlibatan masyarakat dan relawan dalam pencegahan karhutla. Sementara itu, peran sebagai dinamisator terlihat dari koordinasi lintas instansi, pembentukan posko terpadu, dan peningkatan kesigapan menghadapi bencana.Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi peran BPBD dalam penanggulangan karhutla telah berjalan namun belum optimal akibat minimnya SDM, sarana prasarana, serta rendahnya kesadaran masyarakat. Diperlukan penguatan kapasitas BPBD, penyempurnaan regulasi, serta peningkatan edukasi publik guna mengurangi risiko karhutla di Kabupaten Kubu Raya.

Kata Kunci: **BPBD, Kebakaran Hutan dan Lahan, Peran Pemerintah, Penanggulangan Bencana, Kubu Raya**

ABSTRACT

Forest and Land Fires are disasters that occur almost every year in Kubu Raya Regency, especially in areas dominated by peatlands. Geographic conditions, prolonged dry seasons, and the practice of land clearing through burning are among the primary factors that contribute to the increasing incidence of forest and land fires. The aim of this research is to describe the role of the Regional Disaster Management Agency (BPBD) of Kubu Raya Regency in addressing forest and land fires, using Ryaas Rasyid's theory of government roles, which includes the functions of regulator, facilitator, motivator, and dynamizer. This research employed a qualitative descriptive method through observation, in-depth interviews, and document analysis. The research informants included BPBD officials responsible for disaster prevention, preparedness, rehabilitation, and reconstruction activities. The findings show that the BPBD performs its role as a regulator through the formulation of regulations and technical guidelines for disaster management. As a facilitator, the BPBD provides public outreach programs, training, and firefighting facilities, although it continues to face challenges related to limited personnel and infrastructure. Its role as a motivator is reflected in efforts to encourage community and volunteer participation in forest and land fire prevention. Meanwhile, its role as a dynamizer is demonstrated through inter-agency coordination, the establishment of integrated command posts, and the improvement of disaster preparedness measures. This research concluded that the implementation of BPBD's roles in forest and land fire management has been carried out but has not yet achieved optimal effectiveness due to a lack of human resources, inadequate facilities and infrastructure, and low levels of public awareness. Strengthening the BPBD's institutional capacity, improving regulatory frameworks, and improving public education are necessary to reduce the risk of forest and land fires in Kubu Raya Regency.

Keywords: *Regional Disaster Management Agency (BPBD), Forest and Land Fires, Government Role, Disaster Management, Kubu Raya Regency.*

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
UPA BAHASA

RINGKASAN SKRIPSI

Skripsi ini membahas mengenai Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kubu Raya dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla), sebuah bencana yang hampir setiap tahun muncul di wilayah tersebut. Kejadian karhutla di Kubu Raya tidak terlepas dari karakteristik lahan gambut yang mudah terbakar selama musim kemarau yang berkepanjangan, serta perilaku sebagian masyarakat yang masih mengandalkan teknik pembakaran dalam membuka lahan. Minimnya pengetahuan masyarakat mengenai risiko pembakaran, lemahnya pengawasan, dan keterbatasan sumber daya yang dimiliki BPBD turut menjadi faktor penyebab penanganan karhutla belum maksimal. Kondisi tersebut menjadi dasar bagi peneliti untuk mengkaji pelaksanaan fungsi BPBD menurut teori peran pemerintah yang dikemukakan oleh Ryaas Rasyid, yakni peran regulator, fasilitator, motivator, dan dinamisator.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai bagaimana BPBD menjalankan empat fungsi tersebut dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan pejabat BPBD, observasi di lapangan, dan telaah dokumen. Seluruh data yang terkumpul kemudian diuji kebenarannya melalui proses triangulasi sumber dan teknik. Penentuan informan dilakukan secara purposive, yaitu memilih pihak yang mengetahui secara langsung proses penanggulangan karhutla di Kubu Raya.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa BPBD telah berupaya menjalankan perannya sebagai regulator dengan merumuskan berbagai kebijakan dan pedoman teknis yang berlandaskan peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 dan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2021. Selain itu, BPBD juga memperjelas struktur organisasi, membagi tugas tiap bidang, serta mengembangkan berbagai program seperti Desa Tangguh Bencana (DESTANA) dan Kecamatan Tangguh Bencana (KENCANA) untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat di tingkat desa dan kecamatan.

Pada fasilitator, BPBD menyediakan peralatan penanggulangan kebakaran, melakukan pendampingan kepada desa-desa, dan menyelenggarakan pelatihan dan penyuluhan kepada masyarakat. Meskipun demikian, upaya ini masih terhambat oleh kekurangan tenaga ASN, keterbatasan perangkat komunikasi, serta kurangnya alat pemadam yang memadai. Hambatan-hambatan tersebut menyebabkan respons BPBD terhadap kejadian karhutla belum berjalan seefektif yang diharapkan.

Dalam hal motivator, BPBD berupaya menumbuhkan partisipasi masyarakat dengan mengadakan sosialisasi, kampanye anti-pembakaran lahan, dan pelatihan mengenai metode pengelolaan lahan yang lebih aman. Melalui berbagai kegiatan edukasi tersebut, masyarakat diharapkan memahami dampak lingkungan dan kesehatan akibat karhutla serta terdorong untuk tidak lagi menggunakan api dalam pengelolaan lahan. Meskipun kesadaran masyarakat belum menyeluruh, langkah ini menunjukkan komitmen BPBD dalam memperkuat aspek pencegahan.

Peran BPBD sebagai dinamisator terlihat paling menonjol karena lembaga ini mampu memobilisasi berbagai pihak seperti TNI, Polri, relawan, organisasi perangkat daerah (OPD), dan masyarakat untuk terlibat dalam pencegahan dan penanganan karhutla. BPBD mengoordinasikan kegiatan patroli bersama, operasi pemadaman, dan simulasi bencana, serta membentuk kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) sebagai wadah partisipasi masyarakat. Melalui kolaborasi lintas sektor ini, BPBD dapat merespons perubahan situasi di lapangan secara cepat, meskipun masih menghadapi kendala koordinasi di daerah yang sulit dijangkau.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa BPBD Kabupaten Kubu Raya telah melaksanakan seluruh fungsi perannya, tetapi penerapannya belum mencapai tingkat optimal. Keterbatasan jumlah personel, kekurangan peralatan, serta rendahnya pemahaman masyarakat mengenai bahaya karhutla menjadi faktor penghambat utama. Walaupun demikian, berbagai upaya kolaboratif dan program mitigasi yang dilakukan menunjukkan adanya perkembangan yang positif. Peneliti merekomendasikan agar BPBD meningkatkan kapasitas lembaga, memperkuat jaringan koordinasi, menambah fasilitas penanggulangan bencana, serta memperluas edukasi kepada masyarakat untuk menekan risiko karhutla secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan, skripsi ini memberikan pemahaman bahwa keberhasilan penanggulangan karhutla tidak hanya bergantung pada kapasitas lembaga seperti BPBD, tetapi juga ditentukan oleh dukungan regulasi yang memadai dan perubahan perilaku masyarakat dalam mengelola lahan. Temuan ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak pemerintah daerah, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan strategi pengurangan risiko bencana karhutla di wilayah Kubu Raya.

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : MUHAMMAD FARASH SADEWA

Nomor Induk Mahasiswa : E1031211057

Program Studi : ILMU PEMERINTAHAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya dalam Skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar Pustaka.

Pontianak, November 2025

Yang membuat pernyataan



MUHAMMAD FARASH SADEWA

NIM. E1031211057

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

"A*nak lelaki tak boleh dihiriauka Panjang, hidupnya ialah untuk berjuang, kalau perahunya telah dikayuhkan ketengah, dia tak boleh surut palang, meski bagaimana besar ombak, biarkan kemudi patah, biarkan layar robek, itu lebih mulia dari pada membalik Haluan pulang*"

(BUYA HAMKA)

"*Perang telah usai, aku bisa pulang.*

Kubaringkan panah dan berteriak MENANG!"

(NADIN AMIZAH)

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Laki-laki yang bernama A.M Sutiady yang mengajarkan bertanggung jawab atas segala apa yang sudah di mulai dan harus diselesaikan.
2. Perempuan yang bernama Mardawati yang selalu mendoakan saya, memberi semangat hingga mendorong agar akan sukses dan tak pernah lelah untuk memberi motivasi semoga dari keberhasilan ini bisa menjadi kebahagian dan kebangganmu.
3. Teman-teman yang selalu menemani di saat mengerjakan skripsi dan selalu memberikan semangat.

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan Usulan Penelitian Seminar Proposal ini dengan membahas judul "Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Penanggulangan Kebakaran Hutan Dan Lahan di Kabupaten Kubu Raya".

Skripsi Penelitian ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang selama ini telah membantu dalam memberikan dukungan, bimbingan, dan dorongan kepada penulis. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. Herlan, S.Sos, M. Si, Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura.
2. Bima Sujendra, S.IP, M.Si , selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura.
3. Dr. Arifin, S. Sos M.A.B , selaku Dosen Pembimbing Utama, dan Rulida Yuniarsih, S.IP, M.Si , selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan memotivasi selama proses penulisan Usulan Penelitian ini berlangsung.
4. Rulida Yuniarsih, S.IP, M.Si , selaku Dosen Pembimbing Akademik (PA) selama penulis menjalani perkuliahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura.

5. Dr. H. Pardi, S,Sos, M,AB, selaku Dosen penguji selama penulis menjalani perkuliahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura.
6. Bima Sujendra, S,IP, M,Si, selaku Dosen penguji selama penulis menjalani perkuliahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura.

Terlepas dari semua itu, penulis menyadari sepenuhnya bahwa Usulan Penelitian ini masih terdapat kekurangan baik dari segi penulisan maupun tata bahasa. Dalam proses penyusunan penelitian ini, penulis memperoleh banyak bantuan, motivasi, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh narasumber, dosen pembimbing, serta pihak-pihak yang telah memberikan masukan, arahan, dan dukungan selama penelitian berlangsung.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca untuk perbaikan di masa yang akan datang. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan menjadi referensi bagi pihak-pihak yang membutuhkan, khususnya dalam upaya penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kubu Raya.

Pontianak, 7 Mei 2025

Muhammad Farash Sadewa

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING ii
HALAMAN PENGESAHAN iii
KATA PENGANTAR iv
DAFTAR ISI xiv
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang Penelitian 1
1.2. Identifikasi Masalah Penelitian 9
1.3. Fokus Penelitian 9
1.4. Perumusan Masalah 9
1.5. Tujuan Penelitian 9
1.6. Manfaat Penelitian 10
1.6.1. Manfaat Teoritis 10
1.6.2. Manfaat Praktis 10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 11
2.1. Definisi Konsep 11
2.1.1 Konsep Peran 11
2.1.2. Pemerintah (Governance) 12
2.1.3. Bencana 15
2.1.4. Penanggulangan 16
2.1.5. Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) 17
2.2. Teori 17
2.3. Hasil Penelitian yang Relevan 19
2.4. Alur Pikir Penelitian 22
2.5. Pertanyaan Penelitian 25
BAB III METODE PENELITIAN 26
3.1 Jenis Penelitian 26
3.2 Langkah – Langkah Penelitian 26
3.3 Lokasi Dan Waktu Penelitian 28
3.3.1. Waktu Penelitian 29
3.4 Subjek dan Objek Penelitian 29

3.4.1 Subjek Penelitian 29
3.4.2 Objek Penelitian 30
3.5 Teknik Pengumpulan Data 30
3.6 Alat Pengumpulan Data 31
3.7 Analisis Data 32
3.7.1.Teknik Keabsahan Data 33
DAFTAR PUSTAKA 34

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Kebakaran lahan dan hutan termasuk bencana dan gangguan terbesar yang dapat memberikan dampak kerugian terhadap lahan dan hutan di Indonesia. Kebakaran dapat disebabkan oleh dua faktor, yaitu alam dan manusia. Penyebab kebakaran hutan karena faktor alam atau secara alami dipicu oleh petir, lelehan lahar gunung api, gesekan antara pepohonan yang kemudian menimbulkan percikan api. Kebakaran hutan yang diakibatkan oleh petir dan gesekan pohon jarang terjadi di Indonesia apalagi pada hutan hujan tropis. Sedangkan, kebakaran hutan yang disebabkan oleh faktor manusia adalah upaya pengalihan fungsi hutan menjadi lahan industri. Hal ini disebabkan oleh tindakan eksploitasi yang tidak bertanggung jawab, seperti penebangan liar, pembakaran hutan, serta metode pengelolaan yang merusak keanekaragaman hayati. (Irvan Tri Harnanda, 2021, 7)

Penyebab kebakaran lahan yang beragam, sebagian besar disebabkan oleh kegiatan masyarakat dalam membuka lahan garapan di lahan gambut. Metode bakar lahan ini digunakan karna lebih cepat dan biaya yang digunakan lebih sedikit, selain itu menurut petani membuka lahan pertanian dengan cara membakar dapat membuat lahan menjadi lebih subur. Selain itu kebakaran lahan dipicu oleh kondisi hari-hari tidak turun hujan yang cukup panjang yang menyebabkan kekeringan pada gambut, dan sangat mudah terbakar.

Kebakaran hutan di Indonesia tidak hanya terjadi di lahan kering tetapi juga di lahan basah seperti lahan/hutan gambut, terutama pada musim kemarau, dimana lahan basah tersebut mengalami kekeringan. Pembukaan lahan gambut berskala besar dengan membuat saluran/parit telah menambah resiko terjadinya kebakaran di saat musim kemarau. Pembuatan saluran/ parit telah menyebabkan hilangnya air tanah dalam gambut sehingga gambut mengalami kekeringan yang berlebihan di musim kemarau dan mudah terbakar. Terjadinya gejala kering tak balik *(irreversible drying)* dan gambut berubah sifat seperti arang menyebabkan gambut tidak mampu lagi menyerap hara dan menahan air (Adinugroho, Wahyu Catur Suryadiputra, I N.N. Saharjo, Bambang Hero Siboro 2009, 1)

Kebakaran hutan dan lahan memiliki banyak dampak yang berisiko, termasuk kerusakan habitat alam, penurunan kualitas tanah, dan peningkatan emisi gas rumah kaca yang menyebabkan perubahan iklim, serta dapat mengganggu lalu lintas udara, menunda penerbangan, dan mengurangi visibilitas, yang berpotensi mengancam keselamatan penerbangan. Selain itu, asap yang dihasilkan dari kebakaran dapat menyebabkan masalah kesehatan masyarakat yang serius seperti gangguan pernapasan, iritasi mata, dan penyakit lainnya. Akibatnya, penanggulangan karhutla sangat penting untuk menjaga lingkungan dan kesehatan masyarakat. (Widiatmoko, Astiani, and Muin 2022, 909).

Frekuensi kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kalimantan Barat hampir setiap tahun, jelas meresahkan masyarakat karena beragam kerugian dampak dari kabut asap. Kerugian ekonomi, ekologis serta sosial pun terjadi begitu besar akibat kebakaran karena menciptakan kabut asap. Badan

Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalimantan Barat menyatakan 95% kasus kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat terjadi karena ulah manusia, sementara 5% sisanya bersumber dari alam. (BENCANA 2016)

Tabel 1. 1
Data Luas Kebakaran Hutan dan Lahan
Di Kabupaten Kubu Raya 2019-2023

No	Tahun	Luas Kebakaran (Ha)
1	2019	13.565,00
2	2020	357,00
3	2021	8.271,00
4	2022	2.475,00
5	2023	12.539,31

(Sumber Data: Sipongi (Sistem Pemantauan Karhutla))

Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2023 ini kejadian karhutla mendominasi kejadian bencana ini dikarenakan musim kemarau yang panjang sehingga banyak sekali lahan-lahan yang terbakar akibat cuaca yang panas serta peningkatan kejadian kekeringan di beberapa daerah , cuaca panas yang terjadi pada Tahun 2023 mengakibatkan meningkatnya wilayah yang mengalami kekeringan, ini ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah kejadian kekeringan. (Rosyida et al. 2023, 7-8)

Kabupaten Kubu Raya memiliki total luas wilayah 854.929 hektar dan terbagi menjadi sembilan kecamatan, yaitu Kecamatan Batu Ampar, Kecamatan Teluk Pakedai, Kecamatan Terentang, Kecamatan Rasau Jaya, Kecamatan Sungai Raya, Kecamatan Kuala Mandor B, Kecamatan Sungai Kakap, Kecamatan Sungai

Ambawang, dan Kecamatan Kubu (Badan Pusat Statistik Kabupaten Kubu Raya, 2017). Berdasarkan data dari Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM), Kabupaten Kubu Raya memiliki lahan gambut dengan total luas 458.675 hektar. Secara fisik, Kabupaten Kubu Raya didominasi oleh area gambut, yang menyebabkan sering menimbulkan kebakaran lahan dan hutan setiap tahun (Saputra, Wulandari, and Septianti 2024).

Kapabilitas Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat selama ini tidak luput dari perhatian nasional maupun negara tetangga, terhadap kasus kebakaran hutan dan lahan yang terjadi yang menimbulkan dampak kabut asap, yang asapnya dirasakan hingga wilayah negara tetangga (Singapura dan Malaysia) menimbulkan isu keamanan lingkungan bersifat lintas batas, serta dampak asap sampai pada provinsi tetangga, hal ini disebabkan oleh faktor dari letak geografis Kalbar. Frekuensi kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kalbar hampir setiap tahun, jelas meresahkan masyarakat karena beragam kerugian dampak dari kabut asap, dari sisi pemerintahan pada tingkat daerah sudah dalam dua tahun terakhir menyatakan ketidak mampuan dalam menanggulangi kebakaran, dengan menetapkan status darurat kabut asap dan memintah bantuan dari Pemerintah Pusat. Kerugian ekonomi, ekologis serta sosial pun terjadi begitu besar akibat kebakaran karena menciptakan kabut asap.

. Bahaya kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kubu Raya dikelompokkan menjadi kelas rendah, kelas sedang, dan kelas tinggi. Kelas rendah memiliki luas 48.470,51 Ha atau 5,64% dengan 11 titik panas, pada kelas sedang memiliki luas 449.032,24 Ha atau 52,25% dengan 372 titik panas, dan

pada kelas tinggi memiliki luas 361.878,68 Ha atau 42,11% dengan 2.106 titik panas. Data tersebut menunjukan bahwa kecamatan rasau jaya menjadi salah satu bahaya kelas tinggi dengan luas 14.143,41 Ha. Data kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Desa Rasau Jaya, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2025 menunjukkan bahwa wilayah ini menjadi salah satu titik terparah terdampak kebakaran terutama karena karakternya sebagai lahan gambut

Mempertimbangkan kondisi tersebut, maka harus ada upaya untuk menghentikan atau meminimalisir kejadian kebakaran pada musim kemarau tahun-tahun yang akan datang. Musim kemarau adalah musim yang rawan untuk terjadinya kebakaran hutan dan lahan, khususnya di lahan gambut dimana terjadi penurunan permukaan air tanah (Waluyo et al. 2020, 3-4) Untuk mengatasi bencana yang ada di Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana pada pasal 20 dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang mempunyai fungsi (Wahyudi and Sujendra 2018, 3).

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah lembaga pemerintah non departemen yang melaksanakan tugas penanggulangan bencana di daerah baik Provinsi maupun Kabupaten / Kota dengan pedoman pada kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Kubu Raya

Nomor 10 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran pada urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi:

a. Penyusunan program kerja dibidang bencana, kebakaran, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
b. Perumusan kebijakan dibidang bencana, kebakaran, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
c. Penyelenggaraan kebijakan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan serta pelayanan umum dibidang bencana, kebakaran, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
d. Penyelenggaraan administrasi Badan
e. Pembinaan dan penyelenggaraan tugas dibidang bencana, kebakaran, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
f. Pembinaan unit pelaksana teknis Badan
g. Pengoorbadanian, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang bencana, kebakaran, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
h. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Penanggulangan dan pengungsian dilakukan dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efesien serta melakukan pengkoordinasian pelaksanaaan kegitan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh. Sesuai dengan hal tersebut maka pemerintah daerah harus mengeluarkan peraturan daerah mengenai penanggulangan bencana.(Abdurrahman, Jafar, and Sulastri 2020, 98)

Peran BPBD sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam penanggulangan dan pencegahan bencana kebakaran hutan dan lahan sangat penting. Untuk itu dalam rangka melindungi masyarakat pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Peran BPBD sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam penanggulangan dan pencegahan bencana kebakaran hutan dan lahan sangat penting. Sesuai dengan PP Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat 19, yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang disingkat BPBD, adalah badan pemerintah daerah yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah, namun dalam hal penanggulangan bencana karhutla tidak dapat hanya mengandalkan satu pihak saja, dimana BPBD sendiri masih kekurangan sumber daya baik kapasitas sumber daya manusia yang terbatas ataupun fasilitas penunjang penanggulangan bencana yang dinilai masih kurang memadai. Beberapa faktor yang diduga menjadi penyebab adalah kondisi geografis yang rentan terhadap kebakaran, keterbatasan sumber daya manusia BPBD masih kekurangan ASN sebanyak 37 orang, dengan jumlah ideal ASN 49 orang, adanya keterbatasan sarana komunikasi didaerah sehingga menghambat

kecepatan penyebaran arus data ke pusat maupun daerah lain. Sesuai dengan Laporan Rencana Strategi BPBD Kubu Raya 2019-2024 salah satu isu strategis actual yang dihadapai yaitu Penanganan kebakaran hutan dan lahan (kabut asap) agar tidak mengganggu aktifitas masyarakat/Penerbangan.

Dalam hal ini, BPBD Kubu Raya tidak hanya berfokus pada pemadaman kebakaran, tetapi juga melakukan upaya pencegahan melalui edukasi masyarakat, pengawasan, dan kolaborasi dengan berbagai pihak. Dengan meningkatnya frekuensi dan intensitas karhutla, peran BPBD menjadi semakin krusial dalam menjaga lingkungan dan kesehatan masyarakat. BPBD juga menyadari bahwa kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang bahaya karhutla sangat penting untuk mencegah terjadinya kebakaran. Oleh karena itu, mereka mengadakan berbagai program sosialisasi yang melibatkan masyarakat, seperti seminar, pelatihan, dan kampanye informasi. Dalam program ini, masyarakat diajarkan tentang teknik pengelolaan lahan yang ramah lingkungan, serta dampak negatif dari praktik pembakaran lahan yang tidak terkendali.

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan mengetahui Peran BPBD terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kubu Raya. Oleh karena itu, peneliti memilih judul “Peran Badan Penanggulagan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Penanggulangan Bencana Di Kabupaten Kubu Raya”

1.2. Identifikasi Masalah Penelitian

Adapun yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Potensi dan Karakteristik wilayah Kabupaten Kubu Raya sangat memungkinkan tinggiya terjadi kebakaran hutan dan lahan.
2. Belum intensifnya sosialisasi dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan sehingga menyebabkan minimnya kesadaran masyarakat tentang bahaya pembukaan lahan dengan cara pembakaran
3. Belum maksimalnya sumber daya manusia dan keterbatasan sarana dan prasarana dalam pemadaman kebakaran hutan dan lahan

1.3. Fokus Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka peneliti menetapkan fokus penelitian ini Peran BPBD dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan Kabupaten Kubu Raya.

1.4. Perumusan Masalah

Dari paparan latar belakang penelitian, maka peneliti menyimpulkan masalah: “Bagaimana Peran BPBD dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kubu Raya ?”

1.5. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah yang diajukan maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Peran BPBD Dalam Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Kubu Raya

1.6. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan kumpulan hasil penelitian bagi kepentingan ilmu pengetahuan, dapat bersifat teoritis dan praktis. Berikut manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini:

1.6.1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1.6.1.1. Memberikan sumbangan pemikiran dalam Peran BPBD Dalam Penanggulangan Kebakaran Kutan dan Lahan di Kabupaten Kubu Raya.

1.6.1.2. Memberikan sumbangan ilmiah pada bidang ilmu kajian Ilmu Pemerintahan terutama bagi Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

1.6.1.3. Sebagai pijakan dan refrensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.

1.6.2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

1.6.2.1. Bagi penulis penelitian ini merupakan media untuk mengimpementasikan ilmu dan teori yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan untuk memecahkan masalah-masalah yang terjadi dalam menjalankan tugas serta dapat menambah pengetahuan dam pengalaman terutama dalam bidang kajian kebijakan publik.

1.6.2.2. Bagi Pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan dalam meningkatkan bagi instansi pada manajemen kebakaran hutan dan lahan.